



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
JL. MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG

LAPORAN KEUANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PROVINSI JAWA TENGAH



2025



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

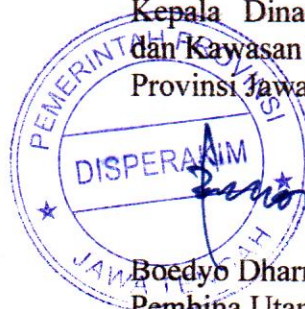
Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di tahun yang akan datang, sekaligus sebagai pertanggungjawaban Pengguna Anggaran kepada Gubernur Jawa Tengah.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang,

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah



Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang,
PENGUNA ANGGARAN

Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	URAIAN	REF	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	PENDAPATAN - LO					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO					
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO		-	-	-	#DIV/0!
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO		-	-	-	#DIV/0!
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LO		-	-	-	#DIV/0!
7	Pajak Air Permukiman - LO		-	-	-	#DIV/0!
8	Pajak Rokok - LO		-	-	-	#DIV/0!
9	Pajak Mal Borak-LO		-	-	-	#DIV/0!
10	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MPLB)-LO		-	-	-	#DIV/0!
11	Retribusi Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
12	Retribusi Jasa Umum - LO		-	-	-	#DIV/0!
13	Retribusi Jasa Usaha - LO		-	-	-	#DIV/0!
14	Retribusi Perizinan Tertentu - LO		-	-	-	#DIV/0!
15	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO		-	-	-	#DIV/0!
17	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO		-	-	-	#DIV/0!
18	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO		-	-	-	#DIV/0!
19	Lain-Lain PAD yang Sah - LO		-	-	-	#DIV/0!
20	Hasil Pemisahan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
21	Hasil Sotah Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
22	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
23	Hasil Kerja Sama Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
24	Jasa Giro - LO		-	-	-	#DIV/0!
25	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		-	-	-	#DIV/0!
26	Pendapatan Bunga - LO		-	-	-	#DIV/0!
27	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugian Keuangan Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
28	Penerimaan Komisi, Polangan, atau Bentuk Lain - LO		-	-	-	#DIV/0!
29	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing - LO		-	-	-	#DIV/0!
30	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO		-	-	-	#DIV/0!
31	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
32	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
33	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO		-	-	-	#DIV/0!
34	Pendapatan dari Pengembalian - LO		-	-	-	#DIV/0!
35	Pendapatan BLUD - LO		-	-	-	#DIV/0!
36	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
37	Pendapatan Dana Kapitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LO		-	-	-	#DIV/0!
38	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		-	-	-	#DIV/0!
39	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) - LO		-	-	-	#DIV/0!
40	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
41	Pendapatan Zakat - LO		-	-	-	#DIV/0!
42	Pendapatan Hasil Pelaksanaan PerjanjianKontrak-LO		-	-	-	#DIV/0!
43	Pendapatan Konsesi Jasa		-	-	-	#DIV/0!
44	Pungutan bagi Wisatawan Asing-LO		-	-	-	#DIV/0!
45	Hasil Pengelolaan Dana Cadangan-LO		-	-	-	#DIV/0!
46	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-LO		-	-	-	#DIV/0!
47	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-LO		-	-	-	#DIV/0!
48	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
49						
50	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
51	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO		-	-	-	#DIV/0!
52	Dana Pembiangan- LO		-	-	-	#DIV/0!
53	Dana Insentif Daerah (DID)- LO		-	-	-	#DIV/0!
54	Insentif Fisikal-LO		-	-	-	#DIV/0!
55	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		-	-	-	#DIV/0!
56	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		-	-	-	#DIV/0!
57	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO		-	-	-	#DIV/0!
58	Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO		-	-	-	#DIV/0!
59	Pendapatan Bagi Hasil- LO		-	-	-	#DIV/0!
60	Bantuan Keuangan- LO		-	-	-	#DIV/0!
61						
62	Jumlah Pendapatan Transfer - LO		-	-	-	#DIV/0!
63						
64	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO					
65	Pendapatan Hibah- LO		-	-	-	#DIV/0!
66	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO		-	-	-	#DIV/0!
67	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO		-	-	-	#DIV/0!
68	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri- LO		-	-	-	#DIV/0!
69	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga Organisasi Dalam Negeri/Uluar Negeri- LO		-	-	-	#DIV/0!
70	Sumbangan Pihak Ketiga/Seyanis- LO		-	-	-	#DIV/0!
71	Dana Darurat- LO		-	-	-	#DIV/0!
72	Dana Darurat- LO		-	-	-	#DIV/0!
73	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO		-	-	-	#DIV/0!
74	Lain-lain Pendapatan- LO		-	-	-	#DIV/0!
75	Pendapatan Dana Kapitas JKN pada FKTP-LO		-	-	-	#DIV/0!
76	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara-LO		-	-	-	#DIV/0!
77	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat- LO		-	-	-	#DIV/0!
78	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi-LO		-	-	-	#DIV/0!
79	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi- LO		-	-	-	#DIV/0!
80	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO		-	-	-	#DIV/0!
81						
82	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH - LO		-	-	-	#DIV/0!
83						
84	BEBAN					
85	BEBAN OPERASIONAL					
86	Beban Pegawai		12.698.936.072,00	13.003.409.204,00	(304.473.132,00)	(6,85)
87	Beban Gaji dan Tunjangan ASN		5.665.625.944,00	5.648.705.720,00	17.220.224,00	0,30
88	Beban Tambahan Penghasilan ASN		7.033.009.128,00	7.516.943.484,00	(483.934.356,00)	(6,84)
89	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		-	437.760.000,00	(437.760.000,00)	(100,00)
90	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	-	#DIV/0!
91	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	-	#DIV/0!
92	beban Honorarium Lainnya Pimpinan UPHU serta KUH/WKUH		-	-	-	#DIV/0!
93	Beban Pegawai BOS		-	-	-	#DIV/0!
94	Beban Pegawai BOSP		-	-	-	#DIV/0!
95	Beban Pegawai BLUD		-	-	-	#DIV/0!
96	Beban Barang dan Jasa		15.437.081.155,59	17.124.385.483,27	(1.687.304.327,68)	(9,85)
97	Beban Barang		2.651.501.091,00	4.340.668.793,00	(1.689.167.702,00)	(38,91)
98	Beban Jasa		9.857.204.803,59	6.357.840.813,27	3.499.363.990,32	55,04
99	Beban Pemeliharaan		566.949.514,00	686.716.971,00	(119.767.057,00)	(17,44)
100	Beban Perjalanan Dinas		2.278.625.347,00	5.721.158.906,00	(3.442.533.559,00)	(80,17)
101	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		82.800.000,00	18.000.000,00	64.800.000,00	360,00
102	Beban Penunjang Otonomi Khusus		-	-	-	#DIV/0!
103	Beban Barang dan Jasa BOS		-	-	-	#DIV/0!
104	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas		-	-	-	#DIV/0!
105	Beban Barang dan Jasa BLUD		-	-	-	#DIV/0!
106	Beban Bunga		-	-	-	#DIV/0!
107	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	#DIV/0!
108	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	#DIV/0!
109	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	#DIV/0!
110	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	#DIV/0!
111	Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-	-	#DIV/0!
112	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	-	#DIV/0!
113	Beban Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah		-	-	-	#DIV/0!
114	Beban Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah		-	-	-	#DIV/0!

115	Beban Subsidi					#DIV/0!
116	Beban Subsidi kepada BUMN					#DIV/0!
117	Beban Subsidi kepada BUMD					#DIV/0!
118	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta					#DIV/0!
119	Beban Subsidi kepada Koperasi					#DIV/0!
120	Beban Hibah	224.089.999,00	1.449.833.634,00	(1.225.743.635,00)		(84,54)
121	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat					#DIV/0!
122	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya					#DIV/0!
123	Beban Hibah kepada BUMN					#DIV/0!
124	Beban Hibah kepada BUMD					#DIV/0!
125	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	224.089.999,00	1.449.833.634,00	(1.225.743.635,00)		(84,54)
126	Beban Hibah Dana BOS					#DIV/0!
127	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Pajal Politik					#DIV/0!
128	Beban Hibah Dana BOSP					#DIV/0!
129	Beban Hibah kepada BUMDesa					#DIV/0!
130	Beban Hibah kepada Koperasi					#DIV/0!
131	Beban Bantuan Sosial	17.500.000.000,00	28.750.000.000,00	(11.150.000.000,00)		(36,78)
132	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	17.500.000.000,00	28.750.000.000,00	(11.150.000.000,00)		(36,78)
133	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok					#DIV/0!
134	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat					#DIV/0!
135	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					#DIV/0!
136	Beban Pembiayaan Putang					#DIV/0!
137	Beban Pembiayaan Putang Pajak Daerah					#DIV/0!
138	Beban Pembiayaan Putang Retribusi Daerah					#DIV/0!
139	Beban Pembiayaan Putang hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					#DIV/0!
140	Beban Pembiayaan Putang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					#DIV/0!
141	Beban Pembiayaan Putang Transfer Pemerintah Pusat					#DIV/0!
142	Beban Pembiayaan Putang Transfer Antar Daerah					#DIV/0!
143	Beban Pembiayaan Putang Lainnya					#DIV/0!
144	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.096.974.777,57	980.744.251,89	116.230.525,68		11,85
145	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	659.486.194,87	577.007.714,85	82.478.480,02		14,20
146	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	206.931.837,11	211.829.315,38	(4.897.578,27)		(2,31)
147	Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Jaringan	978.560,00	81.546,67	897.013,33		1.100,00
148	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya					#DIV/0!
149	Beban Penyusutan Aset Lainnya					#DIV/0!
150	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	229.578.085,79	191.825.074,19	37.753.011,60		19,58
151	Beban Penyusutan Aset Lainnya Aset Lain-Lain					#DIV/0!
152	Beban Penyusutan Aset Korosi Jeda					#DIV/0!
153	Beban Penyusutan Properti Investasi					#DIV/0!
154	Beban Imbalan					#DIV/0!
155	Beban Imbalan Sukuik Daerah					#DIV/0!
156	Jumlah Beban Operasional	47.057.081.004,16	61.908.372.573,16	(14.851.291.569,00)		(23,99)
157	BEBAN TRANSFER					
158	Beban Bagi Hasil					#DIV/0!
159	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa					#DIV/0!
160	Beban Bantuan Keuangan					#DIV/0!
161	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi					#DIV/0!
162	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota					#DIV/0!
163	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota					#DIV/0!
164	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi					#DIV/0!
165	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					#DIV/0!
166	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota					#DIV/0!
167	Jumlah Beban Transfer					#DIV/0!
168	JUMLAH BEBAN	47.057.081.004,16	61.908.372.573,16	(14.851.291.569,00)		(23,99)
169	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL	(47.057.081.004,16)	(61.908.372.573,16)	14.851.291.569,00		(23,99)
170	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
171	SURPLUS NON OPERASIONAL					
172	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO					#DIV/0!
173	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO					#DIV/0!
174	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO					#DIV/0!
175	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO					#DIV/0!
176	Surplus Penyusutan Kewajiban Jangka Panjang-LO					#DIV/0!
177	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO					#DIV/0!
178	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO					#DIV/0!
179	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO					#DIV/0!
180	Surplus Penyelesaian Premi (Diskonto) Obligasi-LO					#DIV/0!
181	Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah					#DIV/0!
182	Surplus Penyelesaian Obligasi Daerah					#DIV/0!
183	Surplus Penyelesaian Sukuik Daerah					#DIV/0!
184	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO					#DIV/0!
185	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO					#DIV/0!
186	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO					#DIV/0!
187	Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi					#DIV/0!
188	Jumlah Surplus Non Operasional					#DIV/0!
189	DEFISIT NON OPERASIONAL					
190	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO					#DIV/0!
191	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO					#DIV/0!
192	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO					#DIV/0!
193	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO					#DIV/0!
194	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO					#DIV/0!
195	Defisit Penyusutan Kewajiban Jangka Panjang-LO					#DIV/0!
196	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO					#DIV/0!
197	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO					#DIV/0!
198	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO					#DIV/0!
199	Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah					#DIV/0!
200	Defisit Penyelesaian Obligasi Daerah					#DIV/0!
201	Defisit Penyelesaian Sukuik Daerah					#DIV/0!
202	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO					#DIV/0!
203	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO					#DIV/0!
204	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO					#DIV/0!
205	Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi					#DIV/0!
206	Jumlah Defisit Non Operasional					#DIV/0!
207	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					#DIV/0!
208	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(47.057.081.004,16)	(61.908.372.573,16)	14.851.291.569,00		(23,99)
209	POS LUAR BIASA					
210	BEBAN LUAR BIASA					
211	Beban Luar Biasa					#DIV/0!
212	Beban Tidak Terduga					#DIV/0!
213	Beban Luar Biasa Lainnya					#DIV/0!
214	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA					#DIV/0!
215	JUMLAH POS LUAR BIASA					#DIV/0!
216	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	(47.057.081.004,16)	(61.908.372.573,16)	14.851.291.569,00		(23,99)

* Data Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

